

# Ambiguitas Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Batam

Ikrar Niekha Elmawayanti Laia<sup>a,\*</sup>, Lubna Salsabila<sup>b</sup>, Karol Teovani Lodan<sup>c</sup>

<sup>a,b,c</sup> Department of Public Administration, Faculty of Social Sciences and Humanities, Universitas Putera Batam

\* pb201010020@upbatam.ac.id

---

## Abstract

This research focuses on the economic development and unique institutional dynamics of Batam Island, Indonesia, since the 1970s. Initially developed under the governance of the Batam Authority (now BP Batam), Batam has experienced rapid population growth and significant economic expansion, making it one of Indonesia's fastest-growing cities. Despite economic downturns in other parts of Indonesia, Batam has consistently attracted foreign direct investment (FDI) and avoided recessions. The research examines the visionary leadership of B.J. Habibie, whose tenure transformed Batam into a major industrial hub with top-tier infrastructure, and the subsequent economic boom during the 1990s, marked by high growth rates. The study also addresses the dual institutional governance between the Batam City Government and BP Batam, which has led to conflicts in authority over licensing, land management, and assets. Efforts by the central government to maintain Batam's special status while implementing regional autonomy policies are explored, including the transition from a Free Trade Zone (FTZ) to a Special Economic Zone (SEZ) to attract investment. Methodologically, this research utilizes both secondary data from previous studies and primary data from surveys and interviews with Batam's stakeholders, including government representatives, business leaders, and community members. Findings highlight ongoing legal ambiguities, declining investment, economic growth challenges, and social issues. The study provides insights into the perspectives of experts and industry players on Batam's current problems and potential policy solutions for its future development.

**Keywords** Economic Development; Special Economic Zone; Governance Issues

## Abstrak

Penelitian ini berfokus pada perkembangan ekonomi dan dinamika kelembagaan yang unik di Pulau Batam, Indonesia, sejak tahun 1970an. Awalnya dikembangkan di bawah pemerintahan Otoritas Batam (sekarang BP Batam), Batam telah mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat dan ekspansi ekonomi yang signifikan, menjadikannya salah satu kota dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia. Meskipun terjadi penurunan ekonomi di wilayah lain di Indonesia, Batam secara konsisten menarik investasi asing langsung (FDI) dan menghindari resesi. Penelitian ini mengkaji kepemimpinan visioner B.J. Habibie, yang masa jabatannya mengubah Batam menjadi pusat industri besar dengan infrastruktur terbaik, dan ledakan ekonomi yang terjadi setelahnya pada tahun 1990an, yang ditandai dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Kajian ini juga membahas dual tata kelola kelembagaan antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam yang berujung pada konflik kewenangan perizinan, pengelolaan lahan, dan aset. Upaya pemerintah pusat untuk mempertahankan status keistimewaan Batam sembari menerapkan kebijakan otonomi daerah diawasi, termasuk peralihan dari Kawasan Perdagangan Bebas (FTZ) ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk menarik investasi. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan data sekunder dari penelitian sebelumnya dan data primer dari survei dan wawancara dengan pemangku kepentingan di Batam, termasuk perwakilan pemerintah, pemimpin bisnis, dan anggota masyarakat. Temuan-temuan tersebut menyoroti ambiguitas hukum yang masih terjadi, penurunan investasi, tantangan pertumbuhan ekonomi, dan permasalahan sosial. Studi ini memberikan wawasan mengenai perspektif para ahli dan pelaku industri mengenai permasalahan Batam saat ini dan solusi kebijakan potensial untuk pengembangannya di masa depan.

**Kata Kunci** Pertumbuhan ekonomi; Kawasan Ekonomi Khusus; Masalah Tata Kelola

---

## 1. Pendahuluan

Pulau Batam telah dikenal sebagai daerah istimewa sejak tahun 1970-an, ketika masih

dalam tahap awal pembangunan, sebagai akibat dari penerapan kebijakan khusus yang berbeda dan perbedaan dengan daerah lain di Indonesia. Berkat penataannya yang unik, Batam menjadi salah satu kota dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia. Ketika Otorita Batam (sekarang dikenal sebagai BP Batam) menciptakan kota tersebut pada tahun 1970-an, hanya ada sekitar 6.000 orang yang tinggal di sana. Empat puluh tahun kemudian, Populasi Batam melonjak 158 kali lipat pada tahun 2010 dan telah berkembang setelah 300 kali lipat. Realitas ini menjadi jelas pada tahun 2000-an, ketika FDI ke Indonesia menurun akibat krisis. Lebih dari daerah lain di Indonesia, Batam terus menjadi lokasi yang diinginkan untuk investasi asing. Salah satu keunggulan ekonomi Batam adalah salah satu dari sedikit daerah di Indonesia yang tidak pernah mengalami resesi. Fakta ini menjadi sangat jelas pada tahun 2000-an ketika FDI ke Indonesia menurun akibat krisis meskipun Batam, lebih dari daerah lain di Indonesia, tetap menjadi tujuan FDI yang populer. Salah satu daerah di Indonesia yang tidak pernah mengalami krisis ekonomi adalah Batam yang berkembang pesat dan menawarkan sejumlah keuntungan ekonomi (Sistem & Pembangunan, 2020)

B.J. Habibie dari Otoritas Batam lebih memilih Batam selama masa jayanya. Kepemimpinannya yang visioner telah menjadikan Batam sebagai pusat industri yang diakui secara global. Sebagai kepala Otorita Batam selama 20 tahun, B.J. Habibie telah berhasil mengubah Pulau Batam dari hutan belantara menjadi pusat industri utama di Asia Pasifik. Fasilitas kelas tertinggi adalah infrastruktur penting dan dibutuhkan di kawasan industri. Pada tahun 1990-an, sektor industri dan komersial Batam mengalami ledakan yang luar biasa, terlihat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 17%, yang mencapai puncaknya pada tahun 1991 sebesar 31,28%. Sektor komersial di Pulau Batam berkembang pesat sebelum pemerintahan BJ Habibie berakhir pada tahun 1998 ketika ia terpilih menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Sebenarnya, krisis ekonomi di Indonesia tidak banyak berdampak pada iklim investasi Pulau Batam. Namun hingga akhir pemerintahannya, perekonomian Pulau Batam belum juga menjelma menjadi sektor teknologi tinggi.

Batam merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang tidak pernah mengalami resesi. Perekonomian Batam tumbuh lebih dari 3% sementara pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 1998 anjlok hingga minus 13,1%. Hingga dekade 1990-an, ekspansi ekonomi Batam kerap melampaui target negara. Sangat

menarik untuk dicatat bahwa para pendatang dan pencari kerja dari berbagai daerah di Indonesia tertarik ke Batam. Terbukti, pertumbuhan populasi tahunan telah melampaui 15% selama sepuluh tahun terakhir (Daerah, n.d.)

Menurut berbagai kajian dan penelitian terdahulu, permasalahan utama Kota Batam sudah pernah ada sebelum otonomi daerah diterapkan di Batam. Tahun 2000, saat Pemerintah Kota Batam, dahulu Otorita Batam (OB), berdiri. Menjadi satu-satunya pengembang di Pulau Batam dan memegang posisi hukum dan politik yang sangat kuat menyebabkan dualisme kelembagaan. mendirikan Badan Usaha (BP) Batam sejak tahun 1970-an. Sejatinya, telah terjadi konflik kewenangan di sejumlah wilayah di Batam, antara lain terkait perizinan, pengelolaan lahan, aset, dan lain-lain. Dualitas ini menyebabkan sejumlah masalah, dan berdampak negatif pada segalanya (Tiza, Hakim, & Haryono, 2014)

Sejak munculnya dualisme kelembagaan antara Pemerintah Kota dan Badan Pengusahaan Batam, berbagai upaya dilakukan, termasuk yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, untuk menata kekhasan dan keistimewaan Kota Batam dengan tetap menjalankan kebijakan otonomi daerah di sisi lain. Menurut studi lapangan, sejumlah pemangku kepentingan, termasuk internal Badan Pengusahaan Batam dan pemilik usaha lokal, memastikan bahwa mereka menegakkan kebijakan Free Trade Zone (FTZ) yang berlaku di Batam sejak tahun 1970-an. Pasca munculnya otonomi daerah, sejumlah pihak berupaya melestarikan dan memperkuat keberadaan FTZ secara de jure melalui undang-undang dan peraturan pemerintah. Ini menjelaskan bagaimana kejadian dari tahun 2000 hingga 2007 terjadi.

Walaupun Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Dewan Pelabuhan Bebas (PBPB) telah dilaksanakan, namun status quo tetap dipertahankan dengan penerapan kebijakan baru Pemerintah, khususnya pembentukan Kawasan Khusus. Kawasan Ekonomi (KEK) di Batam. Setelah masa transisi enam bulan, pemerintah akan mengubah Kawasan Batam dari zona perdagangan bebas (FTZ) menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK) dalam bentuk enclave (kawasan berikat). Pelaku usaha yang telah memanfaatkan fasilitas FTZ paling sedikit 5 (lima) tahun tetap diberikan izin oleh pemerintah untuk memindahkan kegiatan usahanya ke kawasan KEK.

Mengingat UU FTZ yang terbit pada tahun 2007 menyatakan bahwa pembentukan FTZ

Batam akan berlaku selama 70 (tujuh puluh) tahun sejak pelaksanaan, beberapa pengusaha Batam melihat perkembangan ini sebagai bukti konsistensi dari pemerintah pusat. Akibatnya, undang-undang tentang status Batam telah didistribusikan. Selain itu, beberapa pelaku usaha skeptis terhadap implementasi KEK karena Batam memiliki pengalaman dengan kawasan yang mirip dengan KEK pada tahun 2004 tetapi gagal dan hanya berjalan satu tahun implementasi, yang menyebabkan pesimisme mereka. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2003 yang mulai berlaku pada Januari 2004 didasarkan pada gagasan yang hampir sama dengan KEK, (Ilmu & Dan, 2015).

## 2. Kajian Literatur

Peran pemerintah daerah dalam membina kewirausahaan, yaitu bagaimana mereka dapat mendukung pengembangan usaha kecil melalui kebijakan atau industri. Strategi untuk usaha kecil adalah membantu setiap perusahaan tumbuh dengan menawarkan dukungan dan pelatihan. Pemerintah dapat membantu dengan menawarkan kredit dan subsidi kepada perusahaan di daerah jika mereka kekurangan dana. Diperkirakan bahwa pemilik usaha kecil akan mendapat dukungan yang cukup dari subsidi dan jalur kredit ini untuk terus mengembangkan operasi mereka. Sebagai pengusaha, pemerintah daerah berperan penting dalam kegiatan produktif yang mendukung kemajuan ekonomi daerah dan nasional. bahwa dengan adanya usaha di daerah akan memacu perbaikan dalam proses produksi karena mereka berani (Siswanto et al., 2019)

Pembangunan wilayah adalah strategi pembangunan yang bertujuan untuk menciptakan perubahan bagi masyarakat, pemerintah, dan lingkungan hidup di suatu wilayah atau wilayah tertentu dengan memanfaatkan atau memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dan kumpulan pendekatan metode holistik. lengkap sambil menjunjung tinggi urutan kepentingan. Perencanaan bottom-up, atau partisipasi masyarakat, sangat penting untuk peran pemerintah daerah dalam mempromosikan program perencanaan pembangunan daerah .

Pengembangan Pulau Batam mengingat strategi ekonomi regional dan khusus Indonesia. Ada banyak undang-undang aneh, beberapa di antaranya juga dipraktikkan di Batam. Ungkapan "Zona Ekonomi Khusus" Karena dapat digunakan untuk menggambarkan zona ekonomi yang berbeda, Buku Kawasan Ekonomi Khusus dan Strategis Indonesia memberikan definisi yang cukup luas. Akan tetapi, Bank Dunia menegaskan

bahwa semua KEK harus mencakup wilayah yang diatur oleh suatu badan, secara fisik dibagi oleh wilayah pabean yang berbeda, dan di mana orang-orang di Wilayah tersebut dapat memperoleh keuntungan. Dengan kata lain, kawasan ekonomi khusus (KEK) adalah tempat di mana pemerintah ingin menarik lebih banyak investasi dan ekspor dengan menawarkan keunggulan kompetitif yang berbeda untuk bisnis yang memilih untuk mendirikan di sana.

Menurut (Sistem & Pembangunan, 2020) Kawasan Ekonomi Khusus adalah tempat-tempat yang memiliki definisi perdagangan bebas secara fisik dan legal, serta fasilitas untuk impor bebas bea barang modal dan ekspor bahan mentah yang digunakan dalam produksi komoditas. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di bawah penguasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi perekonomian, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Keistimewaan Kawasan Ekonomi. memperoleh fasilitas tertentu. KEK terkadang disebut sebagai kawasan industri (IE), pelabuhan bebas, zona perdagangan bebas (FTZ), zona pemrosesan ekspor (EPZ), dan zona bebas (FZ). Zona Perdagangan Bebas (FTZ), Zona Pemrosesan Ekspor (EPZ), dan Area Pelabuhan Bebas (Freeports) adalah tiga jenis utama KEK. Perlu dicatat bahwa nama-nama ini sering digunakan secara bergantian dengan KEK dalam banyak literatur yang membahas topik ini. Namun, judul-judul ini membantu mengklarifikasi variasi sederhana yang ada di setiap tujuan zona dan hasil yang diantisipasi.

KEK yang paling sering terlihat di pelabuhan internasional adalah Juga dikenal sebagai zona komersial bebas, zona perdagangan bebas. Dengan menawarkan kawasan dan fasilitas bebas bea termasuk penyimpanan, perdagangan, pergudangan, dan lainnya, zona ini dimaksudkan untuk mendorong perdagangan, pengapalan, dan ekspor. Misalnya, sektor pelabuhan Singapura memiliki enam zona perdagangan bebas di mana barang dapat disimpan tanpa dikenakan biaya, dan prosedur pabean untuk barang yang datang atau melewati Singapura telah disederhanakan. (Erlinda, 2016)

Pada dasarnya ada dua model untuk mengimplementasikan KEK. Pertama, KEK adalah istilah umum untuk daerah yang berkomitmen menawarkan lingkungan yang bebas dari hambatan bisnis dan berdaya saing internasional guna mendorong peningkatan ekspor dalam negeri. India dan Filipina sama-sama menggunakan ide ini. Ada tiga kategori utama KEK di India: KEK multiproduk, KEK khusus sektor, dan KEK perdagangan bebas

dan gudang. Sebaliknya, KEK di Filipina dapat berbentuk kawasan industri, zona pemrosesan ekspor, zona perdagangan bebas, atau fasilitas wisata/rekreasi. Kedua, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang meliputi Kawasan Perdagangan Bebas (FTZ), Kawasan Pemrosesan Ekspor (EPZ), Pelabuhan (Ports), dan Industri Teknologi Tinggi, merupakan tempat dengan kebijakan ekonomi terbuka.

Pembentukan Zona Perdagangan Bebas (FTZ), juga dikenal sebagai Kawasan Ekonomi Khusus dan Strategis Indonesia, dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) yang didirikan pada tahun 1970 menjadi pendorong dimulainya pembangunan kawasan strategis Indonesia. Selain itu, Indonesia mulai mengembangkan Kawasan Berikat (Kawasan Gudang Berikat) pada tahun 1972. Pembangunan kawasan industri dimulai pada tahun 1989, dan masing-masing pada tahun 1996 dan 2009, Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) didirikan. Perbaikan tambahan akan datang nanti. Wilayah Indonesia yang diaturnya berbeda dengan kawasan pabean dan dibebaskan dari pajak impor, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPnBM, dan cukai yang dikenal dengan KPBPB. Untuk meningkatkan daya saing komoditas ekspor Indonesia di pasar global, KPBPB mengupayakan pertumbuhan di berbagai sektor ekonomi, antara lain perdagangan, jasa, dan manufaktur. Pelabuhan Sabang dan Batam dikategorikan sebagai KPBPB pada tahun 1970 berdasarkan peraturan tidak tertulis. Provinsi Kepulauan Riau, Pulau Batam, Bintan, dan Karimun diakui sebagai zona perdagangan bebas pada tahun 2007. (Jamaluddin, Sumaryana, Rusli, & Buchari, 2018)

Penimbunan barang impor dan/atau barang dari tempat lain yang akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan barang ekspor di dalam kawasan pabean dilakukan di kawasan terlarang yang disebut KB. Tujuan utama Kawasan Berikat adalah untuk mempromosikan ekspor dengan meningkatkan daya saing ekspor sebagai hasil produksi yang efisien.

Menurut Keputusan Presiden No. 89 Tahun 1996, KAPET merupakan kawasan perbatasan khusus yang memenuhi tiga persyaratan berikut: (1) memiliki potensi pertumbuhan yang cepat; (2) Memiliki potensi pengembalian investasi yang tinggi. (3) Memiliki sektor unggulan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. 13 tempat telah diakui sebagai KAPET dan diharapkan menjadi pusat pengembangan ekonomi lokal. KAPET dimaksudkan sebagai strategi pemerataan pembangunan dan katalisator kemajuan

ekonomi daerah, khususnya di kawasan timur Indonesia. Kawasan industri adalah lokasi dengan pusat operasi industri konsentrasi tinggi yang dibangun dan dijalankan oleh perusahaan kawasan industri. Pembentukan Kawasan Industri dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing industri lokal. Sekitar 96 Kawasan Industri hadir di Indonesia pada tahun 2012. Peraturan Kawasan Industri (Keppres No. 41 Tahun 1996). Dengan terciptanya KI, tujuan pembangunan industri seharusnya dapat didukung dengan lebih cepat, tepat, dan tertata. Hal ini diharapkan dapat mempercepat kegiatan industri, merangsangnya di kawasan industri, mempercepat perluasan industri regional, dan mengintensifkan inisiatif ramah lingkungan. pengembangan industri.

### **3. Metode Penelitian**

Beberapa cara pengumpulan sumber data dan referensi digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh gambaran luas tentang permasalahan terkini yang dihadapi Kota Batam. Sumber pertama adalah data sekunder, yang telah dikumpulkan dari penelitian, pemeriksaan, dan studi sebelumnya. Banyak organisasi dan lembaga, antara lain Kajian ISEI Batam (2011), Kajian Bank Indonesia Batam (2011), Laporan Badan Pengusahaan Batam, BPS Kota Batam, dan lain-lain telah melakukan penelitian mengenai hal ini. Sumber kedua adalah informasi langsung yang dikumpulkan dari survei dan wawancara langsung dengan warga Batam yang dianggap memiliki pengetahuan tentang kota dan kebijakannya. Perorangan tersebut antara lain perwakilan Pemerintah Kota Batam, Badan Pengusahaan Batam, KADIN Kepulauan Riau, dan DPRD Kota Batam, selain pengusaha dan anggota komunitas bisnis masyarakat lainnya. Studi ini juga melakukan survei terhadap warga Kota Batam untuk mengetahui bagaimana perasaan masyarakat umum di sana terhadap permasalahan yang sedang terjadi. Untuk memperkuat pernyataan yang dibuat oleh sumber ilmiah dan otoritatif.

### **4. Hasil dan Pembahasan**

Dalam analisis ini, mereka yang dianggap memiliki pemahaman menyeluruh tentang isu-isu di Batam dan kemampuan berpikir kritis dan objektif disebut sebagai ahli atau responden ahli. Para akademisi, perwakilan bisnis, pemerhati masyarakat Batam, jurnalis, perwakilan bisnis, dan perwakilan profesional—termasuk pengacara, pakar, dan perencana kota—memilih responden ahli Dualisme kelembagaan dan/atau tumpang tindih tumpang kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam,



menurut para responden ahli, merupakan persoalan mendasar di Kota Batam. Karena Batam sering mengubah peraturannya, penawaran hukum menjadi perhatian utama. Selain itu, Kota Batam saat ini menghadapi sejumlah masalah sosial serta penurunan investasi, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing. (Farhan, Razma, & Amalia, 2017)

Tabel 1. Permasalahan Batam dalam Perspektif Responden Ahli atau Pakar

No.	Permasalahan Kota Batam Menurut Ahli
1.	Mungkin ada dualitas lembaga atau kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam.
2.	Karena perubahan kebijakan Batam yang sering dan orientasi kebijakan Batam jangka panjang, terdapat ambiguitas hukum.
3.	Pembangunan ekonomi dan investasi menurun di Batam.
4.	Daya saing Kota Batam terpuruk
5.	mengatasi masalah sosial (narkoba, kemiskinan, bantuan )

Survei pemain komersial dan industri di seluruh dunia dilakukan dengan menggunakan purposeful sampling, dan 50 (lima puluh) sampel dipilih berdasarkan jenis, skala, dan penyebaran operasi mereka di berbagai kawasan industri di Batam. Temuan studi menunjukkan bahwa persaingan kelembagaan dan/atau perebutan kekuasaan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam adalah akar dari sebagian besar masalah kota. Akibatnya, muncul persoalan resistensi dan sengketa hukum, serta anjloknya investasi dan pertumbuhan ekonomi. berbagai masalah hukum, serta masalah perlawanan. Batam telah mengalami pergeseran kebijakan, masalah ketenagakerjaan, penurunan daya saing, dan tantangan sosial (Solusinya, 2012). Peran pemerintah daerah sebagai stimulator pemerintah juga dapat berfungsi sebagai stimulan dalam pengembangan bisnis dengan kegiatan khas yang dapat menarik orang dari

seluruh dunia ke daerah tersebut dan mempertahankannya di sana. Sebagai motivator, pemerintah daerah secara aktif mendorong masyarakatnya untuk mengejar kesejahteraan dan kehormatan. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan memberikan bantuan keuangan atau dengan memasarkan barang- barang daerah di pameran dagang dan di media cetak dan elektronik lainnya tentang sumber daya yang disajikan di wilayah Batam. Pemerintah sedang mempertimbangkan bagaimana menangani usaha kecil untuk meningkatkan kesejahteraan warga dan menciptakan lapangan kerja (Soares, Nurpratiwi, & Makmur, 2015).

Dengan menggunakan teknik purposive sampling, populasi perguruan tinggi di Kota Batam disurvei. Sampel dipilih berdasarkan usia dan tingkat pendidikan, khususnya usia di atas 20 tahun dan pendidikan minimal D3/S1. orang-orang yang lebih mengetahui dan mengetahui kejadian-kejadian di Batam. Selain itu, pengambilan sampel mengikuti rata-rata jumlah penduduk dan luas pemukiman di setiap kecamatan Batam. Menyusul implementasi kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kebijakan Free Trade Zone (FTZ), pembentukan Kota Wisata di Batam, dan penerapan otonomi khusus di Batam, masyarakat Batam menilai beberapa hal berbeda. kebijakan yang dapat diterapkan di Batam. Otorita Batam menjalankan kebijakan Batam (Pemko Batam dibubarkan), dan Pemko Batam mendirikan otonomi penuh seperti provinsi Indonesia lainnya antara tahun 1970-an dan 1990-an. 50 (lima puluh) sampel dipilih untuk survei pelaku usaha dan sektor industri berdasarkan sifat dan bidang usaha serta lokasi usaha di antara sekian banyak kawasan industri di Batam. Survei dilakukan dengan menggunakan purposive sampling. Kebijakan Free Trade Zone (FTZ), Special Economic Zone (SEZ), dan Special Autonomy (SA) telah berhasil diterapkan oleh kota berdasarkan temuan pengawasan dan umpan balik dari dunia komersial dan industri atas berbagai alternatif kebijakan yang dapat diambil. Langkah selanjutnya adalah mengubah Batam menjadi kawasan industri, mengembalikan kebijakan Batam tahun 1970-an hingga 1990-an (saat Pemko Batam dibubarkan), dan memberikan kewenangan penuh kepada Pemko Batam. sama dengan provinsi Indonesia lainnya (Yudiatmaja, Safitri, Maya, & Manalu, 2015).

## 5. Kesimpulan dan Saran

Temuan analisis, terutama yang didasarkan pada pendapat dan persepsi para ahli dari komunitas bisnis Batam, menunjukkan adanya dualisme kelembagaan antara Pemerintah

Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam serta adanya sikap hukum akibat seringnya perubahan kebijakan di kota. Masalah utama yang dihadapi Kota Batam adalah arah kebijakan Batam jangka panjang. Kesulitan ekonomi termasuk hilangnya investasi, melambatnya pertumbuhan ekonomi Batam, masalah lapangan kerja dan tenaga kerja, dan penurunan daya saing negara kepulauan itu. Daftar masalah sosial di Batam berikut meliputi tingkat kemiskinan, rumah liar, dan waktu reaksi yang cepat. Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh warga Bata yang sedikit berbeda dari studi yang dilakukan oleh spesialis dan perusahaan di Batam, masalah utamanya adalah ekonomi, khususnya dalam menanggapi isu-isu yang membatasi investasi dan menghambat ekspansi ekonomi Batam.

Meski kurang terkenal dibandingkan isu ekonomi, dualisme kelembagaan dan implementasi hukum di Batam dipandang sangat krusial oleh penduduk setempat. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, sebagian besar responden berpendapat bahwa sebagian besar persoalan tersebut lebih banyak disebabkan oleh dualisme kelembagaan dan eksploitasi hukum yang berkembang di Batam pasca penghapusan otonomi daerah di Batam.

Berdasarkan temuan kajian tersebut, Batam memiliki berbagai alternatif kebijakan, antara lain mampu mempertahankan statusnya sebagai pusat kawasan industri, menerapkan kebijakan Free Trade Zone (FTZ), menerapkan kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), atau memantapkan dirinya sebagai negara kota, mendongkrak pariwisata dan periklanan otonomi khusus Batam. Beberapa kelompok juga mendukung penerapan otonomi penuh Pemko Batam dan kembali ke kebijakan Batam Otorita tahun 1970-an-1990-an, yang diikuti di daerah lain di Indonesia

#### Daftar Pustaka

- Islamiyah, D. (2021). Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Pembangunan Kota Banjarbaru Tahun 2021 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- Welem, W., Syaeba, M., & Rustan, I. R. (2020). Peranan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Di Kabupaten Mamasa. *Journal Peqquruang*, 2(2), 47-50.
- Iqbal, M. M., & Utomo, A. K. (2020). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Malang dalam Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Kepanjen Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 6(1), 50-66.
- Munira, W. (2019). Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA): Perannya Dalam Pembangunan Kota Banda Aceh (1983-2015). *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 2(2).
- PAMADI, M. (2007). Implikasi dualisme kebijakan pertanahan terhadap industri properti Kota Batam (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Putra, B. (2014). Dampak Dualisme Kewenangan Dalam Pelayanan Administrasi Penanaman Modal: Studi Kasus Implementasi Desentralisasi di Kota Batam (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Oktari, E. (2014). Administrative Reform of Batam Indonesian Free Zone Authority (BIFZA) in Implementing Free Trade Zone (FTZ) in Batam City Indonesia. *Public Policy and Administration Research* www. iiste. org, ISSN, 2224-5731.
- Hidayat, S., & Hidayat, A. S. (2010). Quo Vadis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Jakarta: Rajawali Pers.
- Zaenuddin, M., Kumorotomo, W., Saleh, S., & Hadna, A. H. (2017). Dualisme kelembagaan antara pemerintah kota dan badan pengusahaan batam serta dampaknya terhadap kinerja perekonomian di kota batam. *Journal of Applied Business Administration*, 1(2), 219-231.
- Zaenuddin, M., Kumorotomo, W., Saleh, S., & Hadna, A. H. (2018, October). IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PASCA DITERAPKAN OTONOMI DAERAH DI KOTA BATAM DAN ALTERNATIF SOLUSI KEBIJAKAN MENDATANG. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN* (pp. 1095-1104).